

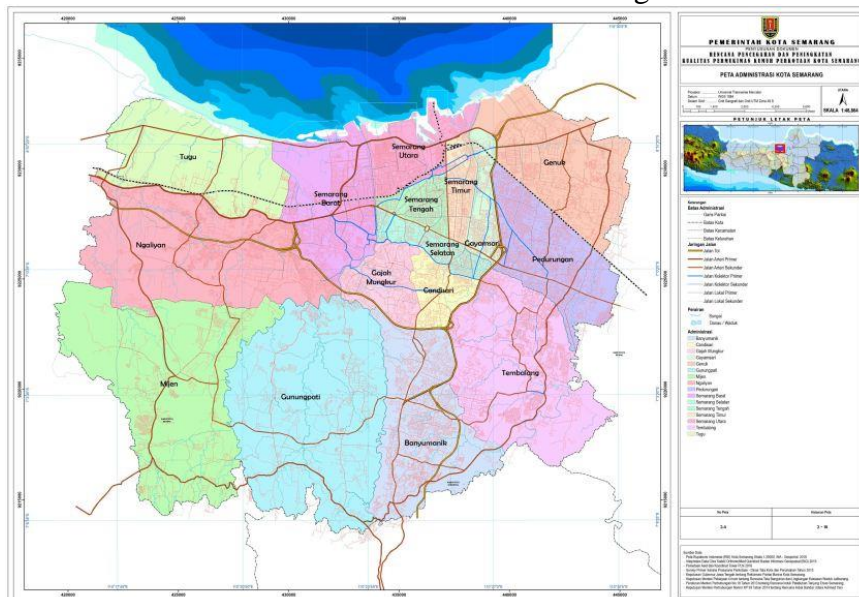
## BAB II GAMBARAN UMUM

### 2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

#### 2.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi Kota Semarang

Secara geografis Kota Semarang memiliki bentuk yang memanjang dari utara ke selatan. Bagian utara Kota Semarang termasuk wilayah pantura dan merupakan jalur utama di Pulau Jawa. Kota Semarang terletak antara garis  $6^{\circ}50'$  -  $7^{\circ}10'$  Lintang Selatan dan garis  $109^{\circ}35'$  -  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur. Kota Semarang memiliki wilayah dengan luas  $373,70 \text{ Km}^2$ . Dari total luas tersebut  $10,59\%$  ( $39,56 \text{ Km}^2$ ) ialah berupa tanah basah atau sawah, dan sisanya  $89,41\%$  ( $334,14 \text{ Km}^2$ ) merupakan tanah kering atau bukan sawah.

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang



Sumber :RP2KPKP Kota Semarang Tahun 2017

Secara administrasi Kota Semarang dibagi menjadi 16 wilayah kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 177 kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang ialah 373,70 km<sup>2</sup>, dengan batas administrasi sebagai berikut:

Sebelah barat	: Kabupaten Kendal
Sebelah timur	: Kabupaten Demak
Sebelah selatan	: Kabupaten Semarang
Sebelah utara	: Laut Jawa

### 2.1.2 Kondisi Demografi Kota Semarang

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2016, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebanyak 1.729.428 jiwa. Dalam kurun waktu 5 tahun (2012-2016) kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk.

Tabel 2. 1

Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2016

No (1)	Kecamatan (2)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) (3)	Jumlah Penduduk (Jiwa) (4)
1.	Mijen	57,55	69.789
2.	Gunungpati	54,11	109.445
3.	Banyumanik	25,69	155.994
4.	Gajah Mungkur	9,07	59.960
5.	Smg. Selatan	5,93	69.684
6.	Candisari	6,54	75.946
7.	Tembalang	44,20	194.231
8.	Pedurungan	20,72	203.866
9.	Genuk	27,39	110.786
10.	Gayamsari	6,18	79.394
11.	Smg. Timur	7,70	74.861
12.	Smg. Utara	10,97	118.157
13.	Smg. Tengah	6,14	60.375
14.	Smg. Barat	21,74	161.054
15.	Tugu	31,78	32.041

(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Ngaliyan	37,99	153.844
<b>Total</b>		<b>373,70</b>	<b>1.729.428</b>

*Sumber: Kota Semarang Dalam Angka, Tahun 2017*

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk tertinggi di Kota Semarang terdapat di Kelurahan Pedurungan yang mencapai 203.866 jiwa dan jumlah penduduk terendah di Kota Semarang terdapat di Kelurahan Tugu yang mencapai 32.041 jiwa.

### 2.1.3 Visi dan Misi Kota Semarang

Visi pembangunan Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat  
Semakin Sejahtera”**

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Misi Pembangunan Daerah Kota Semarang :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

#### 2.1.4 Program Kota Tanpa Kumuh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran. (SE.DJCK No. 40, 2016).

Salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan *platform* kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 propinsi yang menjadi “*platform* kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan

pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “*platform* kolaborasi” yang mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh.

#### 2.1.4.1 Tujuan Program KOTAKU

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:

1. Menurunnya luas permukiman kumuh;
2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik;
3. Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

4. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “*outcome*” sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanankebakaran; Ruang Terbuka Publik);
2. Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;
3. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU;
4. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; dan

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh.

#### 2.1.4.2 Pelaksanaan Program KOTAKU

Tahap implementasi baik kegiatan sosial, kegiatan ekonomi maupun kegiatan infrastruktur ini terjadi di dalam kabupaten/kota sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam dokumen rencana penanganan permukiman kumuh kabupaten/kota dan perencanaan tingkat kelurahan/desa yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang tertera di rencana tahunan dan merupakan kegiatan prioritas penanganan baik skala kota maupun skala lingkungan yang sudah dikoordinasikan sebelumnya.

Pelaksanaan mencakup:

1. Penganggaran di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten/kota untuk memastikan keterpaduan dan ketersediaan anggaran sesuai dengan rencana investasi yang telah disepakati dalam RP2KP-KP/SIAP, rencana kawasan, maupun dokumen lainnya. Kegiatan yang akan dilaksanakan, berdasarkan prioritas dari perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat Kab/Kota atau Kelurahan/Desa dengan sumber pembiayaan dari APBN, APBD, swadaya masyarakat dan sumber pembiayaan lainnya yang sah
2. Penyusunan DED, pelelangan, konstruksi, dan supervise kegiatan. Pelaksana kegiatan infrastruktur skala kabupaten/kota secara kontraktual oleh pihak ketiga (kontraktor) dengan pengadaan barang dan jasa oleh Satker Provinsi, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku

3. Sosialisasi, edukasi, pelatihan terkait pemberlakuan Aturan Bersama atau aturan lainnya untuk pencegahan kumuh dan Rencana O & P.

Berdasarkan sisi pelaku, seluruh tahapan penyelenggaraan Program KOTAKU utamanya dilakukan oleh 5 (lima) tingkatan pelaku, yaitu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Masyarakat/Komunitas.

Tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan program adalah Lurah/Kades dan perangkatnya, BKM/LKM dan perangkatnya, Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Permukiman, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan Relawan. TIPP dibentuk oleh masyarakat, dan terdiri dari unsur aparat kecamatan, kelurahan/desa, BKM/LKM, relawan, kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan. Relawan adalah pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat yang mengabdikan tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Sebagian relawan merupakan Relawan Teknik, yang dibentuk dari para relawan yang memiliki keahlian khusus di bidang PSU untuk memastikan kualitas PSU yang dibangun oleh KSM sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



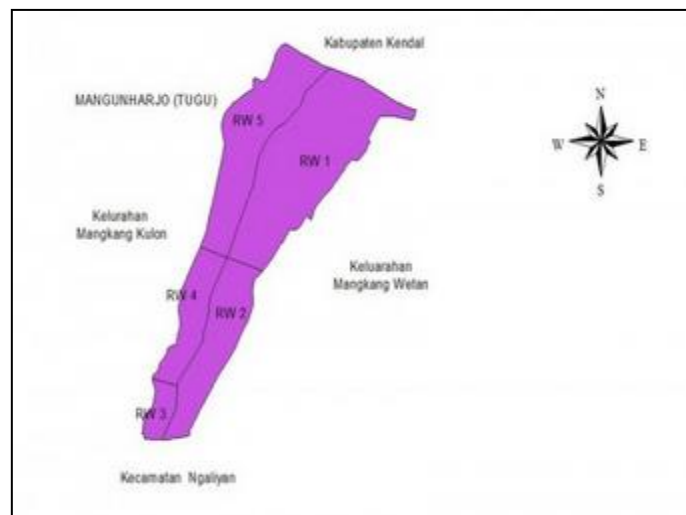
## 2.3 Gambaran Umum Kelurahan Mangunharjo

### 2.3.1 Kondisi Geografis dan Administrasi Kelurahan Mangunharjo

Secara geografis Kelurahan Mangunharjo mempunyai bentuk wilayah yang berupa dataran rendah pantai dan sebagian berbukit dengan ketinggian tanah sebesar 4 meter dari permukaan laut. Kelurahan Mangunharjo terletak di garis  $110^{\circ}18'26.112''$  E dan  $6^{\circ}57' 7.398''$  S.

Gambar 2. 2

Peta Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu



Sumber: <http://kectugu.semarangkota.go.id/kelurahan-mangunharjo>

Secara administrasi Kelurahan Mangunharjo terbagi dalam 5 RW, yaitu RW I memiliki sebanyak 3 RT, RW II memiliki sebanyak 8 RT, RW III memiliki sebanyak 9 RT, RW IV memiliki sebanyak 6 RT, dan RW V memiliki sebanyak 3 RT. Luas wilayah Kelurahan Mangunharjo sebesar 841.700 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah timur : Kelurahan Mangkang Wetan

Sebelah selatan : Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan

Sebelah barat : Kelurahan Mangkang Kulon

### 2.3.2 Kondisi Kawasan Kumuh Kelurahan Mangunharjo

Kelurahan Mangunharjo memiliki kawasan kumuh sebesar 1,56 Ha dengan lokasi kumuh di RT 1/RW 5, RT 2/RW 5, dan RT 3/RW 5. Jumlah penduduk di Kelurahan Mangunharjo sebanyak 576 jiwa dengan kepadatan penduduk 369 jiwa/Ha. Klasifikasi dan tipologi kumuh di Kelurahan Mangunharjo berupa kumuh ringan dengan tipologi permukiman kumuh di dataran rendah, di tepi air, dan di kawasan rawan bencana.

## 2.4 Gambaran Umum BKM Kelurahan Mangunharjo

### 2.4.1 Profil BKM Kelurahan Mangunharjo

Nama BKM : BKM Almubarak

Alamat : Kelurahan Mangunharjo Tugu Semarang

### 2.4.2 Visi dan Misi

**VISI** : Mewujudkan terciptanya organisasi masyarakat sosial di tingkat kelurahan yang memiliki kemampuan sinergis untuk mengatasi persoalan kemiskinan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan.

**MISI** : Menjadi motivator dan inisiator membangun masyarakat melalui penguatan kelembagaan dengan memanfaatkan seluruh potensi masyarakat dan menjalin kerja sama baik dengan pemerintah, dunia usaha maupun kelompok masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

### 2.4.3 Struktur Pengurus BKM Al Mubarak Kelurahan Mangunharjo Kec. Tugu

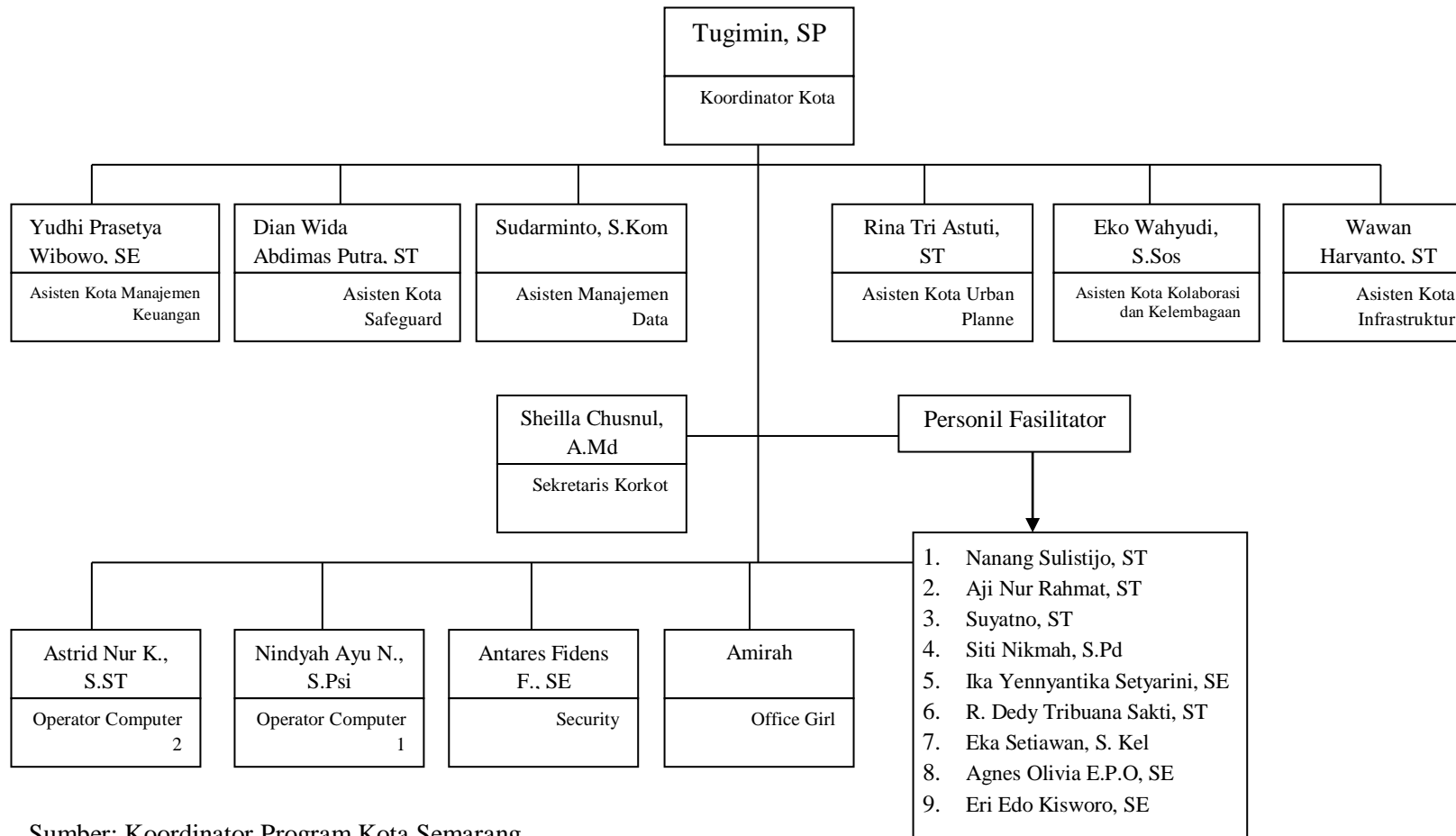
Semarang Periode 2019 – 2022

1. Ketua BKM : Achmad Sodik (Koordinator)
2. Sekretaris : Rina Tri Supriyanti
3. UPK : Nur Harwati
4. UPS : Sunarto
5. UPL : Muhamad Yasin
6. Anggota BKM :
  - a. Munhamir
  - b. Imron
  - c. Agus Susanto
  - d. Imam Sakroni
  - e. Busro
  - f. Khumaidi
  - g. Muhsin
  - h. Intiyah
  - i. Mufidah
  - j. Rufii

## 2.5 Gambaran Umum Korkot Program Kotaku Kota Semarang

### STRUKTUR ORGANISASI KOORDINATOR KOTA PROGRAM KOTAKU KOTA SEMARANG

#### OSP 1 JATENG 1



Sumber: Koordinator Program Kota Semarang